



PROGRAM USAID SEGAR UNTUK Mendukung Konservasi Hutan
KALIMANTAN

Oleh

Mewa Redo Yunia¹, Adiasri Putri Purbantina²

^{1,2}Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294

Email: ¹19044010070@student.upnjatim.ac.id,

²adiasri.hi@upnjatim.ac.id

Abstract

As a tropical country, Indonesia faces challenges managing forests and protected forest areas. This research discusses the degradation and deforestation of Indonesian forests, which have decreased since 2017. Problems that often arise and potentially harm Indonesia's forest ecosystems are land acquisition operations for oil palm land, mining activities, excessive excavation, shifting agriculture systems, over-exploitation of wildlife, and some prohibited activities that can disrupt the balance of an ecosystem. The United States Agency for International Development (USAID) provides funds to support the Indonesian government in various forest conservation activities under the Sustainable Environmental Governance across Regions (SEGAR). SEGAR incentivizes forest managers, farmers, and the business community to adopt sustainable production. This study employs a descriptive qualitative research method to explain the role of foreign aid in preserving forests in developing countries. The authors interview key stakeholders to explore the program's effectiveness. The study finds that SEGAR effectively promotes forest conservation in protected areas. SEGAR also increases the capacity of local community groups to manage natural resources in the area.

Keywords: International Non-Governmental Organization, Foreign Aid, Conservation

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk luas hutan terluas dan keanekaragaman hayati terbanyak di dunia. Namun, ulah manusia yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan deforestasi dan kerusakan hutan yang meluas. Hal ini berdampak pada terancamnya satwa dan tanaman asli Indonesia dan meningkatnya kebakaran hutan (Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, 2017). Dalam menjaga kelestarian hutan, dibutuhkan langkah baru yang inovatif melalui upaya konservasi yang berkelanjutan mengingat semakin berkurangnya luas hutan yang dilindungi. Sejak Maret 2008, Pulau Kalimantan telah dijadikan salah satu dari 40 Kawasan Strategis Nasional

(KSN) di Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26/2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (WWF, 2020).

Dengan meningkatnya masalah lingkungan, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang dijelaskan oleh Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam acara *International Conference on Wildlife Conservation* pada tanggal 13 September 2022 di Jakarta. Inisiatif *Reverse the Red* yang diterapkan oleh Indonesia untuk melindungi spesies, Pemerintah Indonesia telah membebaskan sebanyak 335.047 satwa liar yang sebelumnya diperdagangkan secara ilegal



ke habitat aslinya selama pandemi COVID-19. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan jumlah populasi dan keragaman genetik dalam ekosistem alam liar.

USAID yang merupakan lembaga pembangunan internasional Amerika Serikat, memiliki tanggung jawab dalam memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan serta berperan sebagai katalisator untuk mendorong pembangunan. USAID mulai menjalin kemitraan dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1950, fokus kerja sama tersebut adalah dalam bidang ekonomi dan teknik. Pada awalnya, Pemerintah Amerika Serikat mendukung pembangunan di Indonesia dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. Pada saat itu, Pemerintah Indonesia tengah mencari bantuan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan, permasalahan kesehatan, perbaikan infrastruktur transportasi, dan pengembangan sektor industri (USAID, 2022).

Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman USAID turut berperan dalam membantu negara untuk mengatasi isu lingkungan. Selain memiliki fokus pada bantuan ekonomi dan kemanusiaan, salah satu programnya yaitu *Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR)* yang memiliki tujuan dalam konservasi hutan Kalimantan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi upaya USAID dalam mendukung Pemerintah Indonesia dalam konservasi hutan yang berkelanjutan dan berkolaborasi dengan masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan konservasi hutan Kalimantan dan perlindungan lingkungan secara menyeluruh (USAID, 2021).

LANDASAN TEORI

International Non-Government Organization (INGO)

Menurut Myers (1954), organisasi internasional dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk kerja sama yang terorganisir, biasanya terbentuk

melalui perjanjian multilateral, yang nantinya akan membentuk sebuah struktur organisasi internasional. Organisasi internasional dapat terdiri dari negara-negara anggota yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Clive Archer (2014) dalam bukunya "*International Organization*", klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Tipe keanggotaan (*Type of membership*):

a. Organisasi Internasional Pemerintah (IGO): Merupakan organisasi internasional yang memiliki anggota yang mewakili pemerintahan negara-negara.

b. Organisasi Non-Pemerintah Internasional (INGO): Merupakan organisasi internasional yang anggotanya tidak mewakili pemerintahan.

c.

2. Jangkauan keanggotaan (*Extent of membership*):

a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.

b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah dunia.

International Non-Governmental Organization (INGOs) umumnya terdiri dari anggota yang berasal dari sektor swasta dan beragam bidang, termasuk ekonomi, pendidikan atau penelitian, dan bantuan teknis. INGOs dianggap sebagai aktor yang berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan global, serta sebagai penyedia layanan bagi individu dan komunitas yang terpinggirkan. Mereka tidak mengutamakan orientasi keuntungan, tetapi lebih fokus pada pelayanan sosial dan pengembangan. Dengan kata lain, organisasi internasional melibatkan kerja sama terkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan bersama, sedangkan INGOs merupakan organisasi internasional yang terdiri



dari anggota swasta dengan berbagai latar belakang, dan berfokus pada pemberian kontribusi kepada pembangunan global serta memberikan pelayanan kepada orang-orang dan komunitas yang terpinggirkan, tanpa orientasi keuntungan sebagai prioritas (Myers, 1954, pp. 49(2), 282-283).

Dalam konsep ini, USAID merupakan salah satu organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam menyediakan bantuan ekonomi, pembangunan, pendidikan, kemanusiaan, dan lingkungan di seluruh (Carter, Hill, & Greg, 2007, pp. 43-54). USAID telah mengembangkan program komprehensif yang bertujuan untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar dengan mengintensifkan upaya di perbatasan kawasan hutan lindung dan pelabuhan, untuk mengurangi permintaan konsumen terhadap produk flora dan fauna ilegal (USAID, 2022). Oleh karena itu, organisasi internasional memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan memberikan perhatian kepada wilayah-wilayah yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Melalui bantuan luar negeri, organisasi internasional dapat membantu jutaan orang di seluruh dunia dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, layanan kesehatan, dan obat-obatan (Rasyidah, 2014, pp. 96-97).

Konsep Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*)

Menurut Morgenthau (1962), bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai pemberian bantuan dalam bentuk dana, militer, makanan, atau layanan jasa oleh negara donor kepada negara penerima. Bantuan luar negeri atau bantuan dana hibah menjadi salah satu instrumen ekonomi yang sering digunakan oleh negara-negara industri untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Program bantuan luar negeri memiliki berbagai tujuan, seperti pembangunan infrastruktur bagi negara penerima, dan dapat dikategorikan sebagai bantuan kemanusiaan, penghidupan (*subsistence*), keamanan (*military*), penyogokan (*bribery*), kehormatan (*prestige*),

dan pembangunan ekonomi (*economic development*) (Morgenthau, 1962, pp. 301-309).

Bantuan luar negeri dalam bidang kemanusiaan ditujukan kepada mereka yang kurang beruntung dan tidak melibatkan motif politik. Pemerintah suatu negara memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang mengalami bencana alam seperti banjir, kelaparan, atau wabah penyakit (Lengauer, 2011, pp. 44-48). Bantuan luar negeri dalam bentuk penghidupan (*subsistence*) mirip dengan bantuan kemanusiaan, di mana bantuan penghidupan tidak terkait dengan suatu kepentingan tertentu. Tujuan utama bantuan ini adalah untuk mengatasi resiko kelaparan dan kemiskinan. Selanjutnya, bantuan militer diberikan dalam bentuk pembelian barang, jasa, dan pelatihan pertahanan. Bantuan keamanan (*military*) ini bertujuan untuk membantu negara atau aliansi dalam menghadapi ancaman global, seperti terorisme, serta memperkuat kapabilitas pertahanan mereka. Kategori bantuan lainnya adalah sogokan (*bribery*), yang dapat merujuk pada suap atau korupsi yang bertujuan untuk memuluskan strategi negara-negara pemberi bantuan (Lengauer, 2011).

Bantuan luar negeri dalam kategori kehormatan (*prestige*) mengacu pada dorongan negara pemberi bantuan untuk mempertahankan reputasi positif mereka di mata dunia dan mendapatkan pengakuan sebagai negara yang berdaulat. Sedangkan bantuan luar negeri untuk pembangunan ekonomi (*economic development*) bertujuan untuk mendorong pembangunan dan mengatasi kemiskinan. Bantuan ini sering diberikan dalam bentuk *Official Development Assistance (ODA)*, yang dapat berupa dana hibah kerjasama bilateral antarnegara. Namun, sebagian bantuan juga diberikan dalam bentuk pinjaman, yang seringkali disalurkan melalui organisasi internasional dan non-pemerintah. Dalam hal transparansi, bantuan semacam ini memiliki risiko, karena bisa dianggap sebagai



investasi atau hanya memberikan bantuan modal (Lengauer, 2011).

Dalam konsep bantuan luar negeri, mengkaji dampak dari karakteristik negara penerima utama dan preferensi donor dalam menjelaskan variasi dalam distribusi bantuan keanekaragaman hayati. Terdapat tiga kategori karakteristik negara penerima yaitu:

1. Efektivitas tata kelola mereka.
2. Keanekaragaman hayati dan pembangunan mereka.
3. Kekuatan ekonomi dan politik yang dapat mereka berikan kepada para donor (Alesina, 2000, p. 33).

Karakteristik-karakteristik ini sejalan dengan kategori kebutuhan penerima, dan pengaruh negara penerima yang sering ditemukan dalam penelitian di bidang ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi mengenai distribusi bantuan pembangunan secara umum. Dalam hal ini, donor utama yang berfokus pada lingkungan, seperti *Global Environment Facility (GEF)*, secara eksplisit mempertimbangkan kebutuhan negara penerima ketika mengalokasikan sumber daya (Chan, Shaw, & Cameron, 2006).

Dalam pelaksanaan kerja sama, organisasi internasional turut melakukan kolaborasi dengan berbagai aktor lain, termasuk sektor swasta, pemerintah daerah, dan LSM, yang dikenal sebagai kemitraan multi-stakeholder. Melalui kemitraan ini, berbagai pihak bekerja sama dan berkoordinasi untuk mengatur dan melaksanakan proyek kerja sama yang sedang berlangsung (Beishiem, Ellersiek, & Lorch, 2018, pp. 211-213). Peran LSM sangat penting dalam kerja sama ini, terutama dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan. LSM dapat menggunakan pendekatan politik baik secara resmi maupun tidak resmi, serta memberikan dukungan dan menjalin kemitraan dengan organisasi internasional dalam program konservasi (Romero-Brito, Buckley, & Byrne, 2016, pp. 1-2)

Konsep Konservasi

Konflik antara manusia dan hewan dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem alami yang telah terbentuk. Salah satu strategi untuk melestarikan satwa liar adalah melalui konservasi, karena tanpa konservasi dan perlindungan lingkungan, keberlangsungan alam akan terancam. Konservasi merupakan konsep yang mencakup upaya melindungi dan menjaga penggunaan sumber daya alam secara bijaksana untuk mempertahankan ketersediaannya dan memperluas keanekaragaman dan potensi sumber daya tersebut. Perlunya melindungi sumber daya alam dari degradasi lingkungan mendorong adanya konsep konservasi yang diakui dapat mengatasi kerusakan lingkungan (Christanto, 2014, pp. 1.3, 1-9).

Melalui bantuan luar negeri, berbagai jenis pelayanan telah diberikan, termasuk *Technical Assistance (TA)* yang menyediakan bantuan teknis untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan bimbingan oleh para ahli kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan, termasuk dukungan untuk program-program konservasi yang sedang berjalan (Wilson, 2007, pp. 183-184). Selanjutnya, pemantauan hutan atau *Forest Monitoring* juga melibatkan dukungan dari kelompok masyarakat adat, pihak lokal, dan LSM dalam merancang strategi untuk mendorong sistem konservasi. Hal ini termasuk metode pemantauan yang efektif dengan menggunakan alat pemantauan satelit untuk memonitor satwa liar dan kondisi hutan secara konsisten (Huete, 2012).

Upaya pengelolaan kawasan lindung (*Protected Area Management*) dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, organisasi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengelolaan hutan melibatkan penyelesaian berbagai masalah terkait kawasan konservasi serta pencegahan kerusakan hutan dikemudian hari. Langkah-langkah yang dilakukan termasuk pemantauan dan penertiban terhadap pemegang izin yang



terkait dengan pemanfaatan hutan, upaya restorasi hutan dan perlindungan lingkungan, serta pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

Upaya untuk memanfaatkan dan melindungi sumber daya alam serta ekosistem hayati melalui konservasi melibatkan berbagai aktor, seperti masyarakat adat, pelaku bisnis, organisasi internasional, dan LSM. Dalam mencapai tujuan tersebut, pendekatan budaya, kearifan lokal, dan kemajuan teknologi dapat digunakan. Oleh karena itu, peran negara dalam konservasi sangat penting, termasuk dalam merumuskan strategi lokasi konservasi, menentukan luas kawasan konservasi, serta mengimplementasikan undang-undang yang mengatur kawasan lindung dan perlindungan satwa. Tindakan hukuman juga diberlakukan terhadap pelaku perdagangan satwa dan biota laut yang dilindungi. Upaya pengelolaan konservasi mencakup perlindungan siklus kehidupan, pelestarian keanekaragaman spesies, menjaga kondisi lingkungan, dan penggunaan sumber daya alam secara bijak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pemilihan metode deskriptif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan peneliti untuk memberikan deskripsi mendalam mengenai upaya yang dilakukan oleh USAID sebagai organisasi internasional dalam mendukung konservasi dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan melalui program USAID SEGAR. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode campuran antara data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh informasi tambahan yang tidak tercakup dalam data sekunder, penulis menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan mendalam. Selain itu, dalam pengumpulan data sekunder, penulis juga

menggunakan studi literatur yang meliputi buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerja Sama Program USAID SEGAR dengan Pemerintah Pusat

Bantuan teknis USAID kepada Pemerintah Pusat Indonesia dalam program SEGAR merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung program tersebut. Bantuan teknis ini melibatkan berbagai kegiatan dan inisiatif yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya teknis kepada pemerintah dalam pelaksanaan program SEGAR. Melalui bantuan teknis, USAID berperan dalam memberikan pendampingan dan dukungan ahli kepada pemerintah dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola program SEGAR. Bantuan ini mencakup transfer pengetahuan dan keterampilan teknis dalam berbagai bidang terkait, seperti pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan upaya konservasi.

Melalui kerja sama Program USAID SEGAR, Pemerintah Indonesia akan menerima bantuan dan dukungan dari USAID melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tersebut telah resmi ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2021. Kerja sama ini merupakan program yang akan berlangsung selama lima tahun dengan dana bantuan sebesar 32.700.627 dollar Amerika Serikat. Melalui program ini, USAID memberikan dukungan dan sumber daya kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak negatif terhadap satwa liar di kawasan hutan yang berharga secara ekologis. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan upaya konservasi



satwa dapat ditingkatkan dan ancaman terhadap keberagaman hayati dapat diminimalisir.



Program *Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR)* adalah sebuah proyek kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat. Proyek kerja sama SEGAR diatur dalam *Bilateral Development Co-operation Frameworks (BDCF)*, yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara *United States Agency for International Development (USAID)* dan Indonesia melalui program USAID SEGAR. Proses pembentukan proyek SEGAR juga melibatkan pendampingan teknis atau *Technical Assistance*, di mana tenaga ahli memberikan informasi dan saran kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan serta mendukung program-program konservasi yang sedang berlangsung (Wilson, 2007, pp. 183-184). Dalam hal ini, Program SEGAR mendapatkan arahan dan pendampingan langsung dari USAID Indonesia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS) (USAID, 2021).

Proses pembentukan proyek SEGAR dimulai dengan diterbitkannya catatan konsep atau *Concept Notes* oleh USAID. Selanjutnya, dilakukan pengadaan jasa melalui *Request for Information (RFI)* untuk perekrutan dan pengkaderan yang dilakukan langsung oleh Kementerian PPN/BAPPENAS. Tahap perekrutan dan pengkaderan bertujuan agar para kader memiliki keterampilan dan pemahaman yang baik tentang program yang akan mereka jalankan. Setelah semua informasi terkumpul, USAID menggunakan informasi tersebut untuk melengkapi catatan konsep dan menerbitkan *Request for Proposal (RFP)* yang

diumumkan secara publik untuk proses penawaran dalam pemilihan kontraktor atau vendor (Rafiastanto, 2023).

Berdasarkan RFI tersebut, kontraktor-kontraktor yang tertarik akan mengajukan proposal kepada USAID yang akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam proses seleksi proposal. Dalam Program USAID SEGAR, *Chemonics Inc.* terpilih sebagai implementator yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program SEGAR di tingkat daerah sebagai pendamping teknis. Dalam program SEGAR, terdapat pembagian peran antara USAID dan Bappenas dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi program. USAID tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, melainkan menyediakan pendanaan untuk seluruh kegiatan dalam program SEGAR. Peran USAID adalah memberikan arahan dan pendanaan, sedangkan Bappenas bertanggung jawab dalam koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pencapaian kegiatan. *Chemonics International, Inc.*, sebagai pemenang tender proyek SEGAR, dipilih sebagai pelaksana kegiatan di tingkat lapangan atau di unit dasar di daerah. Sebagai pelaksana kegiatan di lapangan, *Chemonics International* memiliki tanggung jawab melaksanakan berbagai kegiatan proyek sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BAPPENAS dan USAID (Rafiastanto, 2023).

Upaya Konservasi di Indonesia Sebelum Program SEGAR

Di Indonesia, terdapat 521 kawasan konservasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) sejak didirikan pada tahun 2015, dengan total luas mencapai 27.108.486,54 hektar. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melalui inisiatif "*Reverse the Red*" dengan tujuan memperbaiki habitat satwa dan mengembalikan spesies ke alam liar. Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menjelaskan serangkaian



langkah yang diambil oleh Indonesia untuk menjaga kelestarian spesies. Pertama, selama masa pandemi COVID-19, Indonesia telah membebaskan sebanyak 335.047 satwa liar yang berasal dari berbagai pasar gelap ke habitat aslinya, sebagai upaya untuk meningkatkan populasi dan keanekaragaman genetik di hutan Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Kedua, Indonesia melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan pihak terkait dalam program penangkaran dan reintroduksi jalak bali (*Leucopsar rothschildi*) ke habitat alaminya. Langkah ini telah berhasil meningkatkan jumlah populasi jalak bali dari hanya 15 ekor pada tahun 2000 menjadi 452 ekor pada tahun 2022 di Taman Nasional Bali Barat (Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, 2017). Selanjutnya, Indonesia memiliki program penangkaran badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) di *Sumatran Rhino Sanctuary (SRS)* sejak tahun 1998. Program ini telah berhasil menghasilkan tiga bayi badak dan memiliki fasilitas penangkaran yang sukses untuk menjaga kelestarian badak sumatera. Tujuan dari program ini adalah untuk menghasilkan anak badak setiap tahunnya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Selain itu, Indonesia juga menerapkan teknologi inseminasi buatan pada populasi satwa liar, seperti banteng (*Bos javanicus*) di Taman Nasional Baluran dan badak sumatera di Taman Nasional Way Kambas. Dengan bantuan manusia, sperma jantan dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina guna menghindari depresi genetik pada populasi yang terfragmentasi atau berukuran kecil (Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, 2017).

Terakhir, Indonesia melakukan pemantauan terhadap satwa liar dengan menggunakan teknologi seperti kalung pelacak atau GPS Collar pada gajah sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), serta memasang radio telemetri pada orangutan (*Pongo*

pygmaeus dan *Pongo abelii*). Teknologi-teknologi ini digunakan untuk memantau pergerakan satwa liar setelah mereka dilepasliarkan ke habitat alaminya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas teknis dan mengelola kegiatan dukungan manajemen dengan tujuan mencapai tata kelola yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Oleh karena itu, konservasi merupakan isu yang sangat penting dan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembangunan global yang berkelanjutan dalam menjaga ekosistem darat (US Embassy, 2022).

Upaya USAID Sebagai Organisasi Internasional dalam Mendukung Pemerintah Sektor Daerah Terkait Konservasi Hutan Kalimantan Melalui USAID SEGAR

Technical Assistance

Bantuan teknis yang diberikan meliputi pendampingan oleh para ahli, pelatihan, dan penyediaan peralatan pertanian. Tujuan utama dari bantuan teknis ini adalah untuk memenuhi kekurangan keahlian di bidang-bidang spesifik dan transfer pengetahuan dari tenaga ahli internasional kepada tenaga kerja lokal (Holsti, 1987). Bantuan teknis melalui kemitraan SEGAR melibatkan pendampingan teknis oleh tenaga ahli yang disediakan melalui BAPPENAS. Tujuan dari kerja sama ini adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan memperkuat pemahaman nilai-nilai ekologis di masyarakat, kolaborasi dengan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), peningkatan kemampuan pengelolaan desa, perbaikan infrastruktur, pelatihan kebakaran hutan dan lahan, pengadaan alat pemadam kebakaran, serta pemberdayaan masyarakat.

Program SEGAR juga mendukung pengadaan alat pemadam kebakaran untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki sumber daya yang memadai dalam menghadapi kebakaran hutan dan meningkatkan

perlindungan terhadap sumber daya alam. Dampak positif dari program ini termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan, peningkatan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menangani kebakaran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan. Program ini juga berfokus pada merawat, menjaga, dan melestarikan kawasan hutan, sesuai dengan tujuan pemberian bantuan teknis yang telah dilaksanakan oleh USAID pada tahun 2022.

Program Kerja Sama USAID SEGAR dengan Pemerintah Daerah dan LSM dalam *Technical Assistance* Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas hutan seluas 8.389.600 hektar atau sekitar 57,14% dari total luas daratan provinsi yang mencapai 14.680.790 hektar (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2022). Oleh karena itu, mengingat luasnya kawasan hutan dan keanekaragaman hayati yang dimiliki, provinsi ini mendapatkan bantuan dalam bentuk pendampingan teknis. Sejak pertengahan tahun 2021, proyek dengan nama SEGAR telah diluncurkan dan berjalan di empat kabupaten di Kalimantan Barat, yakni Ketapang, Kubu Raya, Sanggau, dan Sintang (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2022). Dalam kurun waktu satu tahun sejak operasionalnya, inisiatif ini telah melakukan berbagai investigasi dengan melibatkan masukan dari para pakar tata kelola lingkungan.



Gambar 1. Kunjungan Direktur USAID Indonesia (Jeff Cohen) terkait Implementasi program SEGAR di Kalimantan Barat, Didampingi langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat

Sumber: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (2022)

Pada tanggal 18 April 2022, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air bersama dengan Direktur USAID Indonesia melaksanakan kunjungan kepada para pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat. Kunjungan ini merupakan bagian dari tanggung jawab Kementerian PPN dalam memberikan arahan dan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2022). Para pemangku kepentingan yang terlibat termasuk Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Sekda Provinsi Kalbar, Dr. Harisson, M.Kes., Kepala Bappeda Kalbar, Ir. Sukaliman, M.T., dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui bantuan internasional yang difokuskan pada konservasi, USAID memberikan *Technical Assistance (TA)* atau bantuan teknis. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mendorong penerapan nilai-nilai ekologis. Program SEGAR membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan dalam memberikan pelatihan kepada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan masyarakat guna meningkatkan kualitas SDM di wilayah tersebut. Dalam rangka meningkatkan



kemampuan pengelolaan desa, USAID memberikan bantuan teknis di Provinsi Kalimantan Barat, dengan tujuan utamanya adalah untuk mengubah desa-desa yang terbelakang menjadi desa mandiri. USAID bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan infrastruktur desa, kesehatan masyarakat, dan pendidikan di wilayah tersebut (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2022).

Kalimantan Timur

Program SEGAR turut mendapatkan dukungan langsung dari Pemerintah Daerah, terutama Wakil Bupati Mahakam Ulu, Drs. Yohanes Avun, M.Si (Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, 2022). Dukungan ini terbukti melalui beberapa Surat Keputusan (SK), salah satunya adalah Surat Gubernur Kaltim No. 050/047/B.EKO-BAPP/2022 tentang Pelaksanaan Proyek SEGAR USAID di Provinsi Kaltim. Dalam pelaksanaan program SEGAR, dilakukan pendampingan teknis oleh tenaga ahli yang berasal dari BAPPEDA Kabupaten Mahakam Ulu di Desa Laham dan Nyaribung, yang keduanya merupakan desa konservasi. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang relevan.

Program SEGAR memiliki tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan sektor perkebunan, termasuk memperkuat pemahaman tentang praktik produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Inisiatif ini sejalan dengan rencana dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan pertanian ladang menetap dan pengelolaan perkebunan kakao. Pelaksanaan pendampingan teknis di Provinsi Kalimantan Timur ditangani oleh Agus Taswanto, S.T., yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur (Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2022).



Gambar 2. Produk Unggulan Kakao Kecamatan Laham

Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Mahakam Ulu (2021)

Kabupaten Mahakam Ulu telah menerima pelatihan dan pembinaan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan petani lokal. Saat ini, sejumlah kegiatan sedang dilakukan, antara lain sinkronisasi program dengan Pemerintah Kabupaten Mahulu, pengembangan lahan tetap dengan luas 10 hektar di setiap desa, pemberian bantuan keuangan kepada penduduk setempat, pengembangan perkebunan kakao, penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk rantai produksi kakao, serta penggunaan sisa Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR). Program SEGAR juga memberikan bantuan kepada petani dalam memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), serta memberikan dukungan dalam proses penanaman dan persiapan produksi kakao di Kabupaten Mahulu (Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, 2022).

Kalimantan Tengah

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kesesuaian program SEGAR dengan program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan pemberian bantuan dan pendampingan teknis oleh tenaga ahli di wilayah tersebut. USAID menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk Dr. H. Kaspinor, SE., M.Si., yang menjabat

sebagai Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang). Pendistribusian bantuan melalui program SEGAR didasarkan pada kesesuaian tujuan program dengan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, yang menekankan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya lokal (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah, 2022)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan BAPPEDA Kalteng dalam menyelenggarakan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemandirian sumber daya manusia. Program SEGAR di Kalimantan Tengah juga turut mendukung pembangunan daerah dengan mengoptimalkan implementasi *e-government*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh program SEGAR adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan bagi pegawai Pemerintah Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah, 2022).

Kontribusi LSM Sahabat Masyarakat Pesisir Pantai (SAMPAN)

Program SEGAR bekerja sama dengan LSM Sahabat Masyarakat Pesisir Pantai (SAMPAN) Kalimantan dan beberapa perusahaan swasta untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam secara bijaksana dalam kerangka konsep konservasi. Salah satu langkah konkrit dalam program ini adalah melindungi luas 70.000 hektar hutan bakau. Dalam upaya ini, Program SEGAR berkolaborasi dengan PT. Mayangkara Tanaman Industri dan PT. Ekosistem Khatulistiwa, perusahaan kayu, untuk memberikan pendampingan teknis dan pendidikan mengenai pengelolaan hasil hutan secara berkelanjutan. Kesepakatan ini dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MOU)* dengan tujuan meningkatkan produksi komoditas, melindungi hutan dan gambut, serta mendorong kerja sama

bersama dalam mengurangi deforestasi (USAID, 2021)

Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Masoraian

Pemberian bantuan teknis di Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan sektor swasta, yaitu PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS), dan LSM Komunitas KTH Karya Masoraian. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota komunitas serta mengembangkan ekonomi di kawasan KTH Komunitas Karya Masoraian. Kolaborasi ini bertujuan agar SSMS dapat menjadi contoh tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam memberikan kontribusi positif dalam pelestarian dan perlindungan kawasan hutan. Dukungan dari berbagai pihak menjadi keberhasilan upaya pelestarian lingkungan dan konservasi melalui program USAID SEGAR di Kalimantan Barat dan wilayah lainnya untuk kebaikan masa depan (Sawit Sumbermas Sarana, 2022).



Forest Monitoring

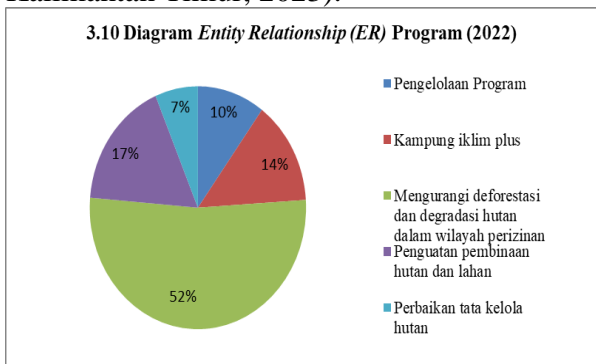
Dalam program SEGAR, pemantauan hutan dilaksanakan melalui kelompok kerja *Monitoring, Reporting, and Verification (MRV)*. Kelompok ini bertugas memfasilitasi kegiatan konservasi, melakukan patroli hutan dengan bantuan ranger, serta melibatkan masyarakat dan LSM dalam menjaga kelestarian hutan. Program SEGAR juga menyediakan alat pemadam kebakaran guna mengurangi resiko kebakaran pada musim kemarau. Program ini juga melibatkan sektor



swasta, terutama perusahaan kelapa sawit, yang bertanggung jawab secara sosial (CSR) dalam menjaga kawasan hutan dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Program Kerja Sama USAID SEGAR dengan Pemerintah Daerah dalam *Forest Monitoring* Kalimantan Timur

Program SEGAR menjalin kerja sama dengan kelompok kerja *Monitoring, Reporting, and Verification (MRV)* dalam rangka menjaga kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2022). MRV berfungsi sebagai clearing house yang mengumpulkan informasi dan data mengenai emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang terkait. Selain itu, Program SEGAR juga berperan aktif dalam pengawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur dan mendukung pengembangan sistem *MAR*. Walaupun ekspor batu bara dari provinsi tersebut memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, namun kontribusi ekspor tersebut terhadap devisa negara sebesar 20-25% setiap tahunnya, Provinsi Kalimantan Timur tetap berhasil menjaga dengan baik 55% lahan hutan melalui kegiatan pelaporan dan analisis (MRV Provinsi Kalimantan Timur, 2023).



KTH Karya Masoraian dan PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Program SEGAR, berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, telah mengizinkan penggunaan sumber daya hutan yang bijaksana

di Desa Kotawaringin Hilir dan Kotawaringin Lama melalui Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPKH). IUPKH ini memfasilitasi pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap kayu, madu hutan, dan empon-empon dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PT. Sawit Sumbermas Sarana TBK, 2021). Pendekatan ini memberikan solusi yang saling menguntungkan dalam pengelolaan dan konservasi hutan. Sosialisasi dengan para pemangku kepentingan merupakan salah satu komponen penting dalam upaya menjaga kawasan hutan dan menjadi bagian dari program kerja sama ini. Melalui pemantauan dan pengelolaan industri hutan, sumber daya alam dapat diekstraksi dengan memperhatikan perlindungan hutan dan memperkuat kerja sama di semua pihak, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (Sundra, 2017)

Protected Area Management

USAID dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memastikan penggunaan lahan dan hutan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan yang bijak, terutama dalam pengelolaan kawasan hutan lindung. Pendekatan berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan dicapai melalui integrasi kegiatan kehutanan dan pertanian, seperti agroforestri. Agroforestri mencakup penggunaan pohon multiguna, produksi kopi, buah-buahan, empon-empon, rempah-rempah, serta komoditas pertanian lainnya.

Program Kerja Sama USAID SEGAR dengan Pemerintah Daerah dalam *Protected Area Management* Kalimantan Barat

USAID turut menjalin kemitraan dengan PT. Eksploitasi dan Industri Hutan III (Inhutani III), anak perusahaan Perhutani, dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan lindung melalui bantuan internasional dan pendekatan konservasi. Inhutani III, sebagai perusahaan yang berkomitmen pada pengelolaan lahan yang berkelanjutan, diwakili oleh *General Manager* Kalimantan Barat yang



bertanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan lindung di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan sumber daya manusia di kawasan hutan lindung akan dilakukan oleh Engkos Kosim, Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, dan Kahayanto, Manajer Nanga Pinoh Selatan. Terdapat pula partisipasi dari perwakilan Asosiasi Perusahaan Karet dan Kelapa Sawit, yang bertujuan untuk mengelola produksi karet dan kelapa sawit dengan pendekatan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan (PT. Sawit Sumbermas Sarana, 2022)

KTH Karya Masoraian dan PT. Dharma Satya Nusantara

LSM KTH Karya Masoraian dan sektor swasta perusahaan kelapa sawit memiliki peran yang penting dalam memastikan pertumbuhan yang berwawasan lingkungan di kawasan hutan lindung. Di Provinsi Kalimantan Timur, PT. Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) bekerja sama dengan pengelola kawasan hutan lindung untuk mengembangkan dan memantau pemeliharaan kawasan konservasi di luar konsesi bisnis *Off-Concession Conservation Areas (OCCA)*. Administrasi OCCA menunjukkan komitmen DSNG terhadap produksi minyak sawit yang berkelanjutan secara ekologis, dan juga merupakan bagian dari perjanjian investasi hijau DSNG dengan andgreen pada tahun 2020. Salah satu tujuan DSNG adalah mengelola dan melindungi area di luar wilayah konsesi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Kolaborasi ini difokuskan pada dua kawasan konservasi utama, yaitu Desa Karang Dalam (3.148 Ha) dan Desa Tepian Langsung (395 Ha). Pemilihan kedua lokasi tersebut didasarkan pada karakteristik lingkungan serta kedekatan dengan area perkebunan DSNG, dan juga karena memiliki nilai konservasi yang penting. Kedua desa ini memiliki sejarah kebakaran hutan dan lahan yang telah menyebabkan degradasi di berbagai area Hutan Desa Tepian

Langsat dan Karang. Dengan demikian, Program SEGAR berkomitmen untuk mencegah kembali terulangnya kebakaran hutan melalui program pengelolaan kawasan hutan lindung (PT. Dharma Satya Nusantara TBK, 2022)

KTH Karya Masoraian dan PT Sawit Sumbermas Sarana TBK

Melalui kolaborasi dengan LSM KTH Karya Masoraian, Program SEGAR menjalin kemitraan dengan perusahaan PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), yang memiliki izin untuk memanfaatkan kawasan hutan produksi atau hutan lindung Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan - IUPHK. Fokus utama dari program kerja sama ini adalah mengelola secara efektif kawasan hutan lindung, memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dengan bijaksana, dan melindungi lingkungan. PT. SSMS, dalam keterlibatannya dengan program SEGAR, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan melalui upaya pemberdayaan kelompok masyarakat. Hal tersebut merupakan contoh nyata bagaimana berbagai pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian dan perlindungan hutan (PT. Dharma Satya Nusantara TBK, 2022)

KESIMPULAN

Program SEGAR USAID telah memberikan bantuan teknis yang melibatkan semua sektor dalam upaya mengurangi bahaya degradasi hutan atau deforestasi. Bukti keberhasilan program ini terlihat dari implementasi program kerja SEGAR di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Program tersebut mencakup pemberian bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pembangunan sarana pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Tujuan dari bantuan teknis ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan menanamkan nilai-nilai ekologis. Pengembangan perkebunan kakao,



implementasi Prosedur Operasi Standar (SOP) dalam rantai produksi kakao, dan pengalokasian Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR) untuk membantu petani dalam mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STBD) adalah beberapa tindakan teknis yang dilakukan untuk memfasilitasi pengembangan lahan seluas 10 hektar di setiap desa dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan desa.

USAID dan pemerintah Indonesia bekerja sama dalam melatih polisi hutan (*ranger*) untuk melindungi kawasan konservasi, mencegah perburuan liar, dan aktivitas ilegal lainnya, dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi melalui pemantauan hutan (*forest monitoring*). Bukti kolaborasi ini dapat dilihat melalui Kelompok Kerja *Monitoring, Reporting, Verifications (MRV)* di Provinsi Kalimantan Timur, di mana data dan informasi mengenai emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh deforestasi dan degradasi hutan dikumpulkan, diklasifikasikan, dan disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, sektor swasta juga terlibat dalam upaya ini, seperti PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS), yang bertanggung jawab dalam aspek lingkungan perusahaan (CSR), dan LSM Komunitas KTH Karya Masoriaian. Kolaborasi ini mencakup kegiatan patroli hutan bersama, survei perbatasan, pemasangan papan peringatan, survei keanekaragaman hayati, pembelian alat pemadam kebakaran, dan penyediaan peralatan operasional untuk meningkatkan efektivitas patroli hutan.

Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung (*Protected Area Management*) memiliki tujuan utama untuk mewujudkan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan melalui sinergi antara sektor kehutanan dan pertanian/agroforestri. Upaya ini melibatkan penggunaan beragam jenis pohon seperti pohon multiguna, kopi, buah-buahan, rempah-rempah, dan komoditas pertanian lainnya. Salah satu contohnya adalah pemberian Izin Usaha Pengelolaan Hasil

Hutan, Kayu Hutan, dan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada Kelompok Tani Hutan Karya Masoriaian, yang memungkinkan mereka memanfaatkan hutan produksi atau hutan lindung (IUPHK) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, terdapat pula kerja sama dengan program Manajemen Ekosistem Bumi Berkelanjutan (STEM) yang dijalankan oleh USAID SEGAR, yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola lingkungan dan kawasan konservasi. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM KTH Karya Masoriaian, Desa Kotawaringin Hilir, Kotawaringin Lama, dan masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alesina, A. D. (2000). Who Gives Foreign Aid to Whom and Why? *Journal of Economic Growth*, 5.1: 33-63.
- [2] Archer, C. (2014). *International Organizations*. Routledge.
- [3] Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah. (2022, Agustus 30). *Workshop Perencanaan dan Sinergi Proyek USAID - SEGAR Tahun ke-2 Prov. Kalteng*. Diambil kembali dari bappedalitbang.kalteng.go.id: <https://bappedalitbang.kalteng.go.id/berita/read/11132/workshop-perencanaan-dan-sinergi-proyek-usaid-segar-tahun-ke-2-prov-kalteng>
- [4] Ban, K. M. (2016). Dalam *Sustainability - engaging future generations now* (hal. 2356-2358.). The Lancet, 387(10036).
- [5] Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. (2022, Februari 15). *Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Proyek USAID SEGAR di Provinsi Kalimantan Timur*. Diambil kembali dari bappeda.kaltimprov.go.id: <https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/rapat-koordinasi-pelaksanaan->



- kegiatan-proyek-usaid-segar-di-provinsi-kalimantan-timur
- [6] Beishiem, M., Ellersiek, A., & Lorch, j. (2018). *INGOs and multi-stakeholder partnerships*. Oxford, UK: Oxford University Press: The Oxford Handbook of Governance and Limited Statehood.
- [7] Carter, J. L., Hill, & Greg, J. (2007). Critiquing Environmental Management in Indigenous Australia: Two Case Studies. *Area*, 39.1:43-54.
- [8] Chan, K. M., Shaw, M. R., & Cameron, D. R. (2006). Conservation Planning for Ecosystem Service Planning for Ecosystem Services. *Plos Biology*, 4.11: 379.
- [9] Chemonics Inc. (2023). *About Us*. Diambil kembali dari chemonics.com: <https://chemonics.com/>
- [10] Chemonics International. (2022). *USAID Indonesia Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR) Activity, Year 2 Work Plan*. Chemonics.
- [11] Christanto, J. (2014). Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Konservasi Sumber Daya ALam*, 1.3, 1-29.
- [12] Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. (2022, Februari 10). *Data Luas Lahan Hutan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020*. Diambil kembali dari data.kaltimprov.go.id: <https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-luas-lahan-hutan-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020>
- [13] Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. (2020, November 19). *7 Program Terbaik untuk Pelestarian Kawasan Konservasi*. Diambil kembali dari dlh.semarangkota.go.id: <https://dlh.semarangkota.go.id/7-program-terbaik-untuk-pelestarian-kawasan-konservasi/>
- [14] Diskominfo Kabupaten Kubu Raya. (2022, April 18). *Bupati Kubu Raya Menerima Audiensi terkait Proyek USAID SEGAR*. Diambil kembali dari <https://diskominfo.kuburayakab.go.id/read/1097/bupati-kubu-raya-menerima-audiensi-terkait-proyek-usaid-segar>
- [15] Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem. (2017). *Hutan dan Lautan adalah Harta Berharga Indonesia*. Diambil kembali dari ksdae.menlhk.go.id: <http://ksdae.menlhk.go.id/info/983/hutan-dan-lautan-adalah-harta-berharga-indonesia.html>
- [16] Holsti, K. (1987). *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- [17] Huete, A. R. (2012). Vegetation Indices, Remote Sensing and Forest Monitoring. *Geography Compass*, 513.
- [18] Husein, U. (2002). *Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa untuk Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi*. Gramedia Pustaka Utama.
- [19] Indonesia. (1990). *Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumberdaya Alama Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [20] IUCN. (2014, Agustus 29). *Komisi Penyelamatan Spesies IUCN*. Diambil kembali dari portals.iucn.org: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-064-Id.pdf>
- [21] Kelompok Tani Hutan Komunitas Karya Masoraian. (2023, 05 09). *Home*. Diambil kembali dari [Masorarian.com](http://masorarian.com): <https://masorarian.com/>
- [22] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*.
- [23] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2014). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan*. Diambil



- kembali dari [ppkh.menlhk.go.id: http://ppkh.menlhk.go.id/uploads/attach/P4_VII_PKH_2014_Monitoring_dan_Evaluasi_Beserta_Lampiran.PDF](http://ppkh.menlhk.go.id/uploads/attach/P4_VII_PKH_2014_Monitoring_dan_Evaluasi_Beserta_Lampiran.PDF)
- [24] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). *Permen LHK RI Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Diambil kembali dari gakkum.menlhk.go.id: https://gakkum.menlhk.go.id/assets/fileperaturan/Permen_LHK_P-18-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan.pdf
- [25] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Contoh Penerapan PHPL sebagai konsep baru mendukung Konservasi*. Diambil kembali dari <http://ditjenppi.menlhk.go.id/dari-media/492-contoh-area-penerapan-phpl-sebagai-konsep-baru-mendukung-konservasi.html>
- [26] Lengauer, S. (2011). *Tiongkok's Foreign Aid Policy: Motive and Method*. Dalam *Tiongkok's Foreign Aid Policy: Motive and Method* (hal. 2, 44-48). Australia: The Bulletin of The Centre for East-West Cultural and Economics Studies.
- [27] Lewis, D. (2009). *Non-Governmental Organization, Definition, and History*. *London School of Economic and Political Science*, 9.
- [28] Lewis, D., & Kanji, N. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development*. London: Routledge, p. 5.
- [29] Merson, M. H., O'Malley, J., Serwadda, D., & Apisuk, C. (2008). *The History and Challenge of HIV Prevention*. *The Lancet* 372(9637), 475-488.
- [30] Morgenthau, H. (1962). *A political theory of foreign aid*. *American political science review*.
- [31] MRV Provinsi Kalimantan Timur. (2023, April 20). *MMR Emisi dan Aktivitas*. Diambil kembali dari mrv.kaltimprov.go.id: <https://mrv.kaltimprov.go.id/id/measure-ment>
- [32] Myers, D. P. (1954). *Organizing for Peace: International Organization in World Affairs*. *American Journal of International Law*, 49(2), 282-283.
- [33] Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Mahakam Ulu. (2021, Juli 18). *Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh melakukan panen perdana kakao di Kecamatan Laham. Kakao Tanaman Unggulan Mahulu*. Diambil kembali dari <http://www.ppid.mahakamulukab.go.id/berita/bupati-mahakam-ulu-bonifasius-belawan-geh-melakukan-panen-perdana-kakao-di-kecamatan-laham-kakao-tanaman-unggulan-mahulu>
- [34] Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. (2022, Agustus 15). *Bupati Buka Lokakarya dan Perencanaan USAID SEGAR di Kutai Timur*. Diambil kembali dari <https://pro.kutaitimurkab.go.id/2022/08/15/bupati-buka-lokakarya-dan-perencanaan-usaid-segar-di-kutim/>
- [35] PT. Dharma Satya Nusantara TBK. (2022, Juni 29). *DSNG Kolaborasi dengan USAID SEGAR untuk Program Konservasi Hutan*. Diambil kembali dari dsn.co.id: <https://dsn.co.id/id/press-release/dsng-kolaborasi-dengan-usaid-segar-untuk-program-konservasi-hutan/>
- [36] PT. Sawit Sumbermas Sarana. (2022, Agustus 24). *SSMS Kembali Menandatangani Perjanjian Kerjasama Bersama dengan KTH Karya Masoraian*. Diambil kembali dari ssms.co.id: <https://ssms.co.id/en/media/detail/ssms-kembali-menandatangani-perjanjian-kerjasama-bersama-dengan-kth-karya-masoraian->
- [37] PT. Sawit Sumbermas Sarana TBK. (2021, Agustus 24). *SSMS Bersama KTH Komunitas Karya Masoraian Melakukan Sosialisasi Perlindungan dan*



- Pengamanan Kawasan Hutan*. Diambil kembali dari ssms.id: <http://ssms.id/en/media/detail/ssms-bersama-kth-komunitas-karya-masoraian-melakukan-sosialisasi-perlindungan-dan-pengamanan-kawasan-hutan>
- [38] Putra, M. H. (2023, Januari 27). Keputusan USAID SEGAR dalam Memilih Provinsi Kalimantan. (M. R. Yunia, Pewawancara)
- [39] Rafiastanto, A. (2023, Mei 6). Pendampingan Teknis yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Program SEGAR. (M. R. Yunia, Pewawancara)
- [40] Rasyidah, R. (2014). INGO sebagai Agent of Aid: Peran dan Kontribusi Oxafam Internasional dalam Penyaluran Bantuan untuk Pengentasan Kemiskinan. *Global and Policy Journal of International Relations*, 96-97.
- [41] Romero-Brito, T. P., Buckley, R. C., & Byrne, J. (2016). NGO Partnerships in Using Ecotourism for Conservation: Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS one*, 1-2.
- [42] Samedri. (1993). Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konserasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1-6, 2.2 1-28.
- [43] Siregar, P. (2009). Konservasi sebagai Upaya Mencegah Konflik Manusia-Satwa. *Jurnal Urip Santoso*.
- [44] Sundra, I. K. (2017). Pengelolaan Sumber Daya Hutan. *Universitas Udayana*.
- [45] USAID. (2021). *Landscape Baseline Analysis - Phase I*. USAID.
- [46] USAID. (2022, Agustus 31). *Dukungan Kami*. Diambil kembali dari [usaid.gov](https://www.usaid.gov/id/indonesia/history): <https://www.usaid.gov/id/indonesia/history>
- [47] USAID. (2022). Forest Conservation. <https://www.usaid.gov/climate/natural-solutions/forest-conservation>.
- [48] USAID. (2022, Juli 29). *Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Amerika Serikat Bermitra dengan Perusahaan Indonesia untuk Mendorong Praktik Bisnis Berkelanjutan*. Diambil kembali dari [usaid.gov](https://www.usaid.gov/id/indonesia/press-releases/jul-29-2022-mitigating-impacts-climate-change-united-states-partners-indonesian-companies-promote-sustainable-business-practices): <https://www.usaid.gov/id/indonesia/press-releases/jul-29-2022-mitigating-impacts-climate-change-united-states-partners-indonesian-companies-promote-sustainable-business-practices>
- [49] USAID. (t.thn.). *Country Development Cooperation Strategy 2020 - 2025*. Diambil kembali dari <https://www.usaid.gov/indonesia/cdcs>
- [50] USAID. (t.thn.). *Environment, Energy, and Infrastructure*. Diambil kembali dari <https://www.usaid.gov/environment-energy-infrastructure>
- [51] USAID SEGAR. (2022). *Terms of Reference (TOR) Stakeholder Mapping*. USAID Indonesia.
- [52] USAID. (t.thn.). *USAID History, Celebrating Sixty Years of Progress*. Diambil kembali dari [usaid.gov](https://www.usaid.gov/about-us/usaid-history): <https://www.usaid.gov/about-us/usaid-history>
- [53] Wilson, G. (2007). Knowledge, innovation and re-inventing technical assistance for development. *Progress in Development Studies*, 183-184.
- [54] WWF. (2020). *Hutan Indonesia: Penyerap atau Pelepas Emisi Gas Rumah Kaca?* Dipetik September 25, 2022, dari http://awsassets.wwf.or.id/downloads/lembar_fakta_deforestasi_tanpa_foto.pdf